

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN  
PEMERINTAH TENTANG STANDAR PENDIDIKAN  
DALAM STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS  
PENDIDIKAN SMP DI KABUPATEN JEPARA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk mendapatkan gelar Magister Manajemen



**Disusun Oleh:**

**SHOLIKUL ARIF  
NIM: 20402400052**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
UNIVERSITAS SULTAN AGUNG  
SEMARANG 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

# EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DALAM STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMP DI KABUPATEN JEPARA

Disusun Oleh:

SHOLIKUL ARIF  
NIM: 20402400052

Telah disetujui pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitia  
ujian usulan penelitian



NIDN : 1029087902

**EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DALAM STRATEGI  
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN SMP DI  
KABUPATEN JEPARA**

**Disusun Oleh:**

**SHOLIKUL ARIF  
NIM: 20402400052**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 28 November 2025

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Pembimbing

Dr. Agustina Fitriantingrum, S.Pd.,M.M.  
NIDN : 1029087902

Penguji I

Prof. Dr. Drs. Hendar, M.Si.  
NIDN : 0602016301

Penguji II

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE, M.Si  
NIDN : 0628066301

**Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Manajemen  
Tanggal 28 November 2025**

Ketua Program Studi Magister Manajemen

Prof. Dr. Ibnu Khajar, SE., M.Si  
NIDN : 0628066301

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHOLIKUL ARIF  
NIM : 20402400052

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**“Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Standar Pendidikan dalam Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP di Kabupaten Jepara”**, adalah hasil karya saya sendiri. Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Saya bersedia menarik tesis yang saya ajukan, apabila terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya sendiri. Saya juga bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas dibatalkan.

Semarang, 20 November 2025  
Yang memberi pernyataan

**SHOLIKUL ARIF**  
**NIM: 20402400052**

## ***ABSTRACT***

*This study aims to evaluate the implementation of government regulations on education standards in the strategy to improve the quality of junior high school education in Jepara Regency. The background of this study stems from the fact that the implementation of regional education policies has not yet fully yielded uniform results in improving school quality. This study uses a qualitative approach with descriptive methods, through data collection techniques such as in-depth interviews, field observations, and documentation studies. Research informants include Education Agency officials, school principals, teachers, and school committees.*

*The results of the study show that local government policies have a significant influence on the direction and quality of education, as reflected in the Jepara Regency Education Report Card, including an increase in the Minimum Service Standard (SPM) index from the Young Completion category to Medium Completion, an increase in junior high school literacy and numeracy achievements, and a School Participation Rate (APS) for 13-15 year olds reaching more than 99% in 2024. However, policy implementation has not been evenly distributed, especially in schools in rural areas that still face limitations in infrastructure, unequal distribution of teachers, and readiness in implementing the new curriculum. Administrative factors, budget constraints, and weak inter-agency coordination also have an impact on the effectiveness of policy implementation.*

*The findings show that school strategies to improve education quality are greatly influenced by the extent of policy intervention received; schools with stronger support are able to implement more focused quality strategies, while schools with limited support face obstacles in optimizing quality improvement. Overall, this study confirms that the success of regional policies has not been fully reflected evenly across all educational units, thus requiring equitable support, strengthened cross-sector coordination, and the use of Education Report Card data as a basis for continuous improvement.*

**Keywords:** government policy, education quality improvement strategy, education quality.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Standar Pendidikan dalam Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP di Kabupaten Jepara. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa implementasi kebijakan pendidikan daerah belum sepenuhnya memberikan hasil yang merata pada peningkatan mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, serta komite sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap arah dan kualitas pendidikan, yang tercermin pada capaian Rapor Pendidikan Kabupaten Jepara, termasuk peningkatan indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari kategori *Tuntas Muda* menjadi *Tuntas Madya*, meningkatnya capaian literasi dan numerasi SMP, serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun yang mencapai lebih dari 99% pada tahun 2024. Meskipun demikian, implementasi kebijakan belum merata, terutama pada sekolah-sekolah di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, ketimpangan distribusi guru, dan kesiapan dalam menerapkan kurikulum baru. Faktor administratif, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga juga berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Temuan menunjukkan bahwa strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh besarnya intervensi kebijakan yang diterima; sekolah dengan dukungan lebih kuat mampu menerapkan strategi mutu yang lebih terarah, sementara sekolah dengan dukungan terbatas menghadapi hambatan dalam optimalisasi peningkatan mutu. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan daerah belum sepenuhnya tercermin secara merata di seluruh satuan pendidikan, sehingga diperlukan pemerataan dukungan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan data Rapor Pendidikan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kebijakan Pemerintah Daerah, Implementasi Kebijakan, Kualitas Pendidikan

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Evaluasi Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Standar Pendidikan dalam Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan SMP di Kabupaten Jepara”.

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung (UNISULLA) Semarang. Penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna, tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak tidak mungkin tesis ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dekan Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 2) Prof. Dr. Ibnu Hajar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- 3) Ibu Dr. Agustina Fitrianingrum, S.Pd., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyusun tesis.
- 4) Seluruh jajaran dosen dan pengelola Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pengetahuan serta bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
- 5) Seluruh Staf Admisi Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menyediakan fasilitas serta informasi-informasi yang diperlukan oleh penulis selama proses perkuliahan dan penyelesaian tesis ini.
- 6) Kepada istri tercinta, Ratna Umi Hanik, S.Pd., atas cinta, dukungan, dan doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah dan usaha saya.
- 7) Tak lupa, rasa syukur saya persembahkan untuk putra-putri saya M. Hafiz Faustin Al Arief, Aira Bening Razita Arumi, Nadiem Iqdam Arsyanendra Al Arief, serta calon buah hati yang sedang dikandung ibunda.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang membantu, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan akademik dalam pengembangan ilmu.

Semarang, 20 November 2025

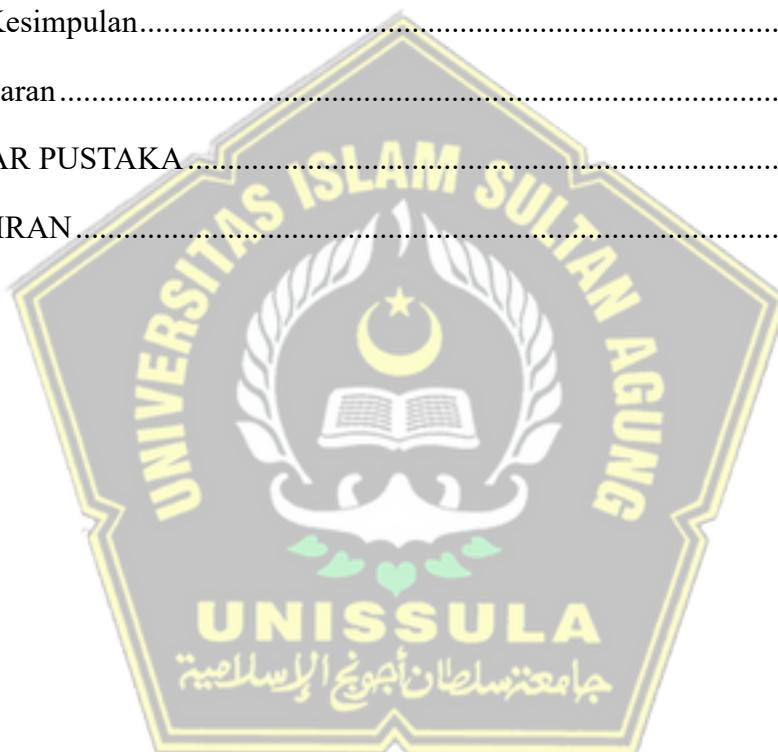
**SHOLIKULARIF**  
**NIM: 20402400052**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS TESIS.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Signifikansi Penelitian.....	4
1.5 Fenomena Gap dan Kebaharuan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	6
2.1 Kebijakan Publik .....	6
2.2 Indikator Penelitian .....	6
2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	7
2.4 Penelitian Terdahulu.....	10
2.5 Kerangka Pemecahan Masalah.....	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	12
3.1 Pendekatan Penelitian.....	12

3.2 Fokus Penelitian .....	12
3.3 Lokasi Penelitian .....	12
3.4 Informan Penelitian .....	13
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	13
3.6 Teknik Analisis Data.....	15
3.7 Keabsahan Data.....	16
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	17
4.2 Temuan Penelitian .....	17
4.2.1 Hasil Wawancara dengan Bupati Jepara .....	18
4.2.2 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara.....	20
4.2.3 Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara .....	24
4.2.4 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Batealit .....	29
4.2.5 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Tahunan .....	33
4.2.6 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Batealit .....	37
4.2.7 Hasil FGD Tokoh Pendidikan Kabupaten Jepara .....	42
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	45
4.3.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan .....	45
4.3.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan di Lapangan .....	46
4.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pendidikan	47
4.3.4 Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	48
4.3.4 Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Implementasinya di Sekolah.....	49
4.3 Pembahasan.....	51

4.3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di SMP Kabupaten Jepara .....	51
4.3.2 Kesenjangan ( <i>Gap</i> ) Antara Kondisi Aktual Dan Kondisi Ideal Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendidikan Di Jepara .....	53
4.3.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tidak Optimalnya Pelaksanaan Strategi Kebijakan Pendidikan Tersebut.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN .....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Evaluasi Kebijakan .....	49
Tabel 4.2 Ringkasan Temuan dari Wawancara Utama.....	50



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	8
Gambar 2.2 Jalur Peningkatan Kualitas Pendidikan .....	9



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pemetaan Sekolah Perkotaan dan Pedesaan .....	63
Lampiran 2. Surat Ijin Penelitian .....	64
Lampiran 3. Hasil Wawancara dengan Bupati Jepara .....	65
Lampiran 4. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga .....	69
Lampiran 5. Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara.....	78
Lampiran 6. Hasil Wawancara Kepada Kepala SMP Negeri 1 Batealit .....	81
Lampiran 7. Hasil Wawancara Kepada Kepala SMP Negeri 1 Tahunan .....	85
Lampiran 8. Hasil Wawancara Kepada Kepala SMP Negeri 2 Batealit .....	87
Lampiran 9. Hasil Wawancara Kepada Kepala SMP Negeri 3 Batealit .....	90
Lampiran 10. Hasil Rekomendasi FGD .....	92
Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian.....	94



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas berperan besar dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Di Indonesia, pendidikan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai bagian dari otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kabupaten Jepara, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah, menghadapi tantangan nyata dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jepara tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen pendidikan masih berada di bawah rata-rata provinsi, dengan angka rata-rata lama sekolah hanya 7,8 tahun dan angka putus sekolah jenjang SMP mencapai 3,5%. Hal ini menunjukkan adanya *gap* atau kesenjangan antara harapan dari implementasi kebijakan pemerintah daerah dengan kenyataan di lapangan. Dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dicanangkan seperti peningkatan dana BOS,

pelatihan guru, serta pembangunan infrastruktur pendidikan nyatanya kualitas lulusan, pemerataan akses, serta mutu proses pembelajaran belum mengalami perubahan signifikan.

Selain itu, strategi pendidikan yang berhasil di tempat lain seperti pendekatan berbasis mutu total (*Total Quality Management in Education*), pembelajaran berbasis komunitas (*community-based learning*), dan kolaborasi lintas sektor akan dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan model peningkatan kualitas pendidikan yang tepat untuk Jepara. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat secara efektif meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah pengembangan pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain mencakup distribusi anggaran pendidikan, pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, meskipun kebijakan-kebijakan ini telah ada, dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Jepara belum terlihat secara maksimal.

Kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan memainkan peranan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Seiring dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada sektor pendidikan. Namun, belum ada bukti yang cukup kuat tentang sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara. Hal ini menjadi

fenomena gap yang menarik untuk diteliti, yakni adanya ketimpangan antara kebijakan yang diterapkan dengan hasil yang tercapai di lapangan.

Fenomena gap ini mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi peningkatan kualitas pendidikan di Jepara yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik dan strategi peningkatan mutu pendidikan, kondisi ini menjadi indikasi adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan daerah. Dalam situasi ini, pendekatan *GAP analysis* digunakan untuk menganalisis perbedaan antara kondisi ideal (harapan) dan kondisi aktual yang terjadi di SMP Kabupaten Jepara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap strategi peningkatan kualitas pendidikan di SMP Kabupaten Jepara?
2. Apa saja kesenjangan (*gap*) antara kondisi aktual dan kondisi ideal dalam implementasi kebijakan peningkatan pendidikan di Jepara?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan strategi kebijakan pendidikan tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap strategi peningkatan kualitas pendidikan di SMP Kabupaten Jepara.
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan pendidikan yang dirancang dan implementasinya di lapangan.
3. Menelusuri faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Jepara.

### **1.4 Signifikansi Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur tentang hubungan antara kebijakan publik daerah dan strategi peningkatan mutu pendidikan, khususnya melalui pendekatan *gap analysis*. Penelitian ini juga menambahkan pemahaman terhadap efektivitas kebijakan publik berbasis pendidikan di wilayah kabupaten.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan para pemangku kepentingan di Jepara dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna, efisien, dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

### **1.5 Fenomena Gap dan Kebaharuan Penelitian**

Fenomena gap dalam penelitian ini merujuk pada ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan peningkatan pendidikan dengan hasil aktual di lapangan. Meskipun pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBD, serta menjalankan berbagai program peningkatan mutu guru dan

fasilitas, kenyataan di SMP menunjukkan banyaknya kendala seperti ketimpangan kualitas antar wilayah, keterbatasan kompetensi guru, dan minimnya partisipasi masyarakat.

Fenomena gap yang terjadi di Jepara berkaitan dengan ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan kualitas pendidikan yang tercapai di lapangan. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah daerah, hasil yang diperoleh dalam peningkatan kualitas pendidikan di Jepara belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengaitkan kebijakan pemerintah daerah dengan hasil peningkatan kualitas pendidikan yang diukur melalui berbagai indikator. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran intervening yang dapat mempengaruhi hubungan antara kebijakan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di Jepara. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara, yang dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kebijakan Publik**

Teori Kebijakan Publik (Dunn, 2018): menjelaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus dirancang berdasarkan analisis kebutuhan, melibatkan partisipasi masyarakat, serta memiliki mekanisme evaluasi berkelanjutan. Teori Strategi Pendidikan: mengacu pada pendekatan manajemen strategis dalam sektor pendidikan yang menekankan perencanaan jangka panjang, kejelasan tujuan, dan keterlibatan seluruh stakeholder (Bryson, 2018).

*Total Quality Management (TQM) in Education* (Sallis, 2014): memfokuskan pada peningkatan berkelanjutan dalam semua aspek pendidikan melalui pelibatan guru, kepala sekolah, siswa, dan masyarakat secara aktif.

*Gap Analysis Model* (Zairi, 1994): digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta merumuskan strategi untuk menutup *gap* tersebut.

#### **2.2 Indikator Penelitian**

Indikator Kualitas Pendidikan

1. Tingkat kelulusan siswa
2. Peningkatan skor ujian nasional
3. Ketersediaan dan kualitas fasilitas Pendidikan
4. Kualitas pengajaran dan kompetensi guru

Indikator Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Jumlah anggaran pendidikan yang dialokasikan

2. Implementasi program pendidikan yang berbasis daerah
3. Adanya program pelatihan dan pengembangan guru
4. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan

#### Indikator Efektivitas Kebijakan

1. Peningkatan indeks pendidikan daerah
2. Perubahan signifikan dalam hasil ujian atau evaluasi Pendidikan
3. Kepuasan stakeholder (siswa, guru, orang tua) terhadap kebijakan Pendidikan

## 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

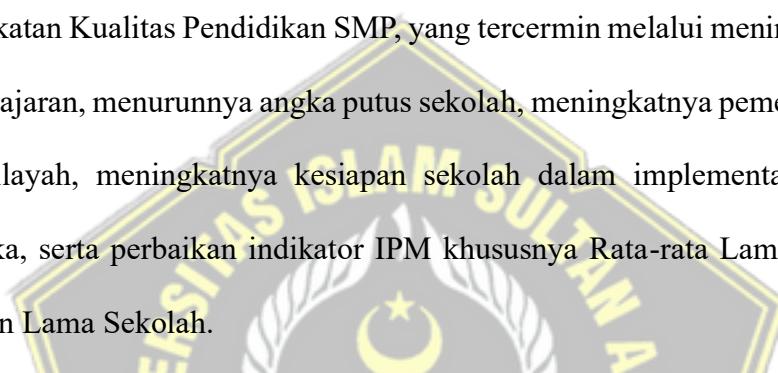
Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kualitas pendidikan. Dalam teori kebijakan publik, kebijakan yang efektif harus mampu mengatasi masalah yang ada, berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan masyarakat. Model yang digunakan dalam penelitian ini akan mengaitkan kebijakan pemerintah daerah sebagai variabel independen dengan kualitas pendidikan sebagai variabel dependen. Sementara itu, efektivitas kebijakan akan menjadi variabel intervening yang dapat mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan hasil pendidikan.



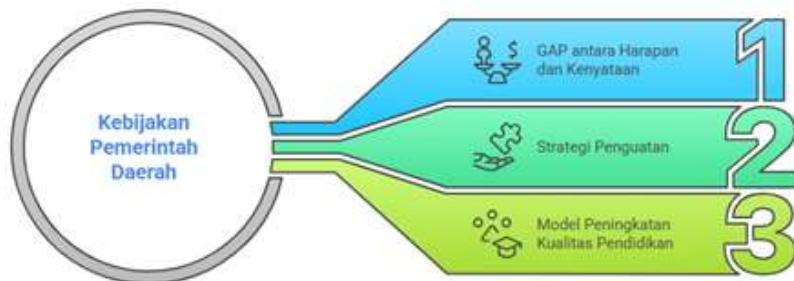
**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**

Aktivitas dalam kerangka KPT terdiri dari rangkaian proses yang saling berhubungan dalam peningkatan kualitas pendidikan SMP di Kabupaten Jepara. Pada aspek Kebijakan Pemerintah, aktivitas yang dilakukan meliputi penyusunan visi dan arah pembangunan pendidikan daerah, perumusan program strategis seperti Kartu Guru Sejahtera, Kartu Sarjana Jepara, penguatan PKBM, dan fasilitasi ATS, serta pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 24–26% dari APBD untuk mendukung pelaksanaan program. Kebijakan tersebut kemudian masuk pada tahap Implementasi Kebijakan yang Efektif, yang dilakukan melalui pelaksanaan Kurikulum Merdeka di sekolah, pemberian pelatihan dan pendampingan guru, penguatan MGMP, serta pemberian bantuan sarana prasarana pendidikan. Implementasi ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama sekolah melalui mekanisme pembinaan dan monitoring.

Pemerintah daerah melakukan Penguatan Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui upaya pemerataan fasilitas sekolah, pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, digitalisasi pembelajaran, serta optimalisasi kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sekolah. Evaluasi kebijakan berbasis data juga menjadi aktivitas penting untuk memastikan kebijakan tetap responsif terhadap kebutuhan lapangan. Rangkaian aktivitas tersebut akhirnya bermuara pada peningkatan Kualitas Pendidikan SMP, yang tercermin melalui meningkatnya mutu pembelajaran, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya pemerataan sarpras antarwilayah, meningkatnya kesiapan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka, serta perbaikan indikator IPM khususnya Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.



#### Memetaikan Jalur Peningkatan Kualitas Pendidikan



**Gambar 2.2 Jalur Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Pemetaan jalur peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang SMP menunjukkan bahwa *kebijakan pemerintah daerah* menjadi titik awal yang menentukan arah pembangunan sektor pendidikan. Kebijakan ini idealnya diterjemahkan ke dalam *implementasi kebijakan yang efektif*, baik melalui pengelolaan anggaran seperti BOS, peningkatan kompetensi guru, maupun

pembangunan infrastruktur sekolah. Implementasi yang efektif kemudian menjadi fondasi bagi *penguatan strategi peningkatan kualitas pendidikan*, mencakup perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan program secara terukur, serta evaluasi yang berkelanjutan. Ketiga jalur tersebut pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan *kualitas pendidikan SMP*, yang tercermin pada indikator seperti angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah, capaian pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan. Dengan demikian, jalur peningkatan kualitas pendidikan membentuk rantai yang saling terhubung, di mana keberhasilan kualitas pendidikan sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan diperkuat melalui strategi yang tepat sasaran.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo, 2019) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020), yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan berperan penting dalam efektivitas kebijakan pendidikan daerah.

Namun, di sisi lain, penelitian oleh (Yuliana, 2021) mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan yang tidak diiringi dengan pendampingan yang memadai bagi guru dan tenaga pendidik dapat menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor ekonomi dan sosial masyarakat menjadi penghalang dalam implementasi kebijakan pendidikan yang berhasil.

## 2.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah dijelaskan, kerangka pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, efektivitas kebijakan, dan kualitas pendidikan. Fokus utama penelitian ini adalah pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, seperti alokasi anggaran, pelatihan guru, serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan hasil analisis tersebut.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis gap, untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kebijakan pendidikan yang telah diterapkan dengan hasil yang dicapai.. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pandangan, pengalaman, dan masukan dari para pemangku kepentingan utama melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion, FGD*).

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah:

1. Strategi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jepara. Menganalisis kesenjangan antara kebijakan dan implementasi.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan di Jepara. Mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung.
3. Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan. Merumuskan model peningkatan mutu.

#### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, dengan melibatkan institusi pemerintah dan pendidikan, seperti Dinas Pendidikan, DPRD, dan beberapa sekolah di wilayah Jepara.

### 3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni individu-individu yang memiliki peran kunci dalam kebijakan pendidikan di Jepara.

Informan utama meliputi:

1. Bupati Jepara: Sebagai pengambil kebijakan strategis di tingkat pemerintahan daerah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Jepara: Sebagai pelaksana kebijakan teknis di sektor pendidikan.
3. Ketua DPRD Jepara: Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan kebijakan dan penganggaran.
4. Kepala Sekolah SMP di Pokja 4: Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional dan pelaku langsung di lapangan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (*FGD*).

#### 1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang disesuaikan dengan masing-masing informan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai kebijakan pendidikan dan implementasinya.

Panduan Wawancara:

- a) Bupati Jepara

a) Bagaimana visi dan misi pemerintah daerah terkait sektor pendidikan?

b) Apa kebijakan strategis yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan?

c) Apa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam implementasi kebijakan pendidikan?

b) Kepala Dinas Pendidikan Jepara:

a) Bagaimana kebijakan pendidikan dirancang dan dilaksanakan di Jepara?

b) Apa langkah konkret yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan?

c) Apa evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan?

c) Ketua DPRD Jepara:

a) Bagaimana peran DPRD dalam mendukung kebijakan pendidikan, terutama melalui anggaran?

b) Apa pandangan DPRD terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan?

c) Bagaimana DPRD mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan?

d) Kepala Sekolah:

a) Apa dampak kebijakan pendidikan pemerintah daerah terhadap operasional sekolah?

- b) Apa kendala utama yang Anda hadapi dalam implementasi kebijakan tersebut?
- c) Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah dalam mendukung kualitas pendidikan?

2. Focus Group Discussion (FGD)

Diskusi kelompok terarah dilakukan untuk mendiskusikan hasil wawancara mendalam dan memperkuat temuan awal. FGD melibatkan semua informan utama, yaitu Bupati, Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPRD, dan Kepala Sekolah. Tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan kolektif dan solusi bersama terkait kebijakan pendidikan di Jepara.

Panduan Diskusi FGD:

- a) Apa saja kebijakan pendidikan daerah yang paling berdampak terhadap kualitas pendidikan?
- b) Bagaimana pemerintah daerah dan DPRD dapat berkolaborasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan?
- c) Apa rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala utama dalam implementasi kebijakan pendidikan di Jepara?

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan FGD dianalisis menggunakan metode analisis tematik dan gap dengan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Meringkas data mentah menjadi informasi yang relevan sesuai fokus penelitian.

2. Kategorisasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti strategi kebijakan, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan.
3. Penarikan Kesimpulan: Menyusun temuan penelitian berdasarkan hubungan antara data yang telah dikategorikan.
4. Menyusun strategi penutupan gap
5. Merumuskan model strategi peningkatan Pendidikan

### **3.7 Keabsahan Data**

Untuk memastikan validitas dan keandalan data, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Triangulasi Metode: Menggabungkan wawancara mendalam dan FGD untuk mendapatkan data yang konsisten dan komprehensif.
2. Triangulasi Sumber: Membandingkan informasi dari berbagai informan untuk memastikan akurasi data.
3. Member Check: Mengonfirmasi hasil wawancara dengan informan untuk memastikan interpretasi yang benar.
4. Audit Trail: Mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan dan analisis data untuk memastikan transparansi dan keterlacakkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana kebijakan pemerintah daerah memengaruhi strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara. Sebagai penelitian kualitatif, kajian ini mengandalkan data empiris melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan utama, antara lain Bupati Jepara, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Ketua DPRD Jepara, kepala sekolah dari beberapa satuan pendidikan, serta diskusi kelompok terarah (FGD) dengan tokoh-tokoh pendidikan. Seluruh informan dipilih berdasarkan pertimbangan peran strategis mereka dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat operasional.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik, sehingga menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, serta tantangan yang muncul dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

#### **4.2 Temuan Penelitian**

Bagian ini memaparkan hasil penelitian mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah berpengaruh terhadap strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Kabupaten Jepara. Penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan pemerintah berjalan, namun kekuatan pengaruhnya

bervariasi tergantung pada aspek regulasi, pendanaan, pembinaan, dan koordinasi dengan sekolah.

#### **4.2.1 Hasil Wawancara dengan Bupati Jepara**

Wawancara dengan Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo, S.E., memberikan gambaran menyeluruh mengenai strategi dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah. Secara umum, kebijakan pendidikan di Jepara diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi daerah yaitu *“Bersama Membangun Kabupaten Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.”*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah program strategis telah diluncurkan, di antaranya Kartu Guru Sejahtera yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN melalui pemberian insentif, serta Kartu Sarjana Jepara yang memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah melanjutkan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam lima tahun terakhir, pemerintah daerah juga berfokus pada penurunan angka putus sekolah melalui fasilitasi program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) secara gratis, pemberian insentif bagi tenaga pendidik nonformal, serta bantuan sosial pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu mulai jenjang PAUD hingga SMP.

Proses perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara dilaksanakan secara partisipatif dan transparan, dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan seperti guru, kepala sekolah, masyarakat, DPRD, serta organisasi masyarakat. Pemerintah juga membuka kanal aduan publik untuk menerima kritik, saran, dan masukan terkait implementasi kebijakan pendidikan.

Dari sisi efektivitas, kebijakan pendidikan di Jepara dinilai telah berjalan sesuai amanat konstitusi dan menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara yang terus meningkat dari 73,15 pada tahun 2022, menjadi 73,85 pada tahun 2023, dan 74,32 pada tahun 2024, dengan target mencapai 74,50 pada tahun 2025. Meskipun demikian, pemerintah menyadari masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam pemerataan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Adapun kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah rendahnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Pemerintah berupaya mengatasi hal ini melalui pendekatan persuasif dan kolaboratif dengan berbagai pihak serta pemberian bantuan sosial pendidikan.

Dalam mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, Pemerintah Kabupaten Jepara memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal dan pemerataan distribusi tenaga pendidik agar kualitas SDM guru di desa dan kota dapat seimbang. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru juga menjadi prioritas, antara lain melalui kerja sama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kualifikasi akademik guru serta implementasi program Kartu Guru Sejahtera.

Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, dengan mekanisme pemantauan serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat secara responsif dan terukur. Lebih lanjut, Bupati Jepara menyampaikan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor anggaran, kualitas SDM, sarana dan prasarana, dukungan masyarakat, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan.

Sebagai penutup, Bupati Jepara berharap seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jepara. Menurutnya, keberhasilan pendidikan akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berkarakter religius.

#### **4.2.2 Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Jepara, diperoleh informasi bahwa strategi peningkatan kualitas pendidikan tingkat menengah pertama di Kabupaten Jepara diarahkan pada peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

Program dan kebijakan yang dijalankan berorientasi pada terwujudnya pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap anak usia sekolah dapat memperoleh pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor ekonomi maupun geografis. Salah satu upaya konkret

adalah melalui program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penguatan layanan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

### 1. Implementasi Program dan Kebijakan Pendidikan

Kepala Bidang Pembinaan SMP menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara diwujudkan melalui beberapa program strategis, antara lain:

- a) Peningkatan Mutu Sekolah dan Pembelajaran, dengan penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan penguatan karakter, kreativitas, dan kemandirian peserta didik.
- b) Peningkatan Kompetensi Guru, melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, baik secara daring maupun luring, serta kolaborasi antar MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).
- c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, agar proses belajar mengajar lebih kondusif dan merata.
- d) Program Satu GTK Satu ATS, yang mendorong setiap guru dan tenaga kependidikan untuk mengajak minimal satu anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.

### 2. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan

Dalam proses perumusan kebijakan, Dinas Pendidikan melibatkan seluruh unsur terkait, seperti kepala sekolah, guru, pengawas, dan komite sekolah, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lapangan. Pelaksanaan kebijakan juga disertai dengan pendampingan, sosialisasi, serta evaluasi rutin

oleh Bidang Pembinaan SMP untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif.

Dijelaskan pula bahwa kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara bersifat berkelanjutan (sustainable) dan selalu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah. Setiap program pendidikan dirancang agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di kelas.

### 3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah adanya komitmen pemerintah daerah yang tinggi, dukungan anggaran pendidikan dari APBD, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya pendidikan. Namun, terdapat pula beberapa kendala dalam pelaksanaan program, di antaranya:

- a) Keterbatasan guru di daerah terpencil, terutama untuk mata pelajaran tertentu.
- b) Keterbatasan sarana prasarana di beberapa sekolah pinggiran.
- c) Masih adanya peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan rawan putus sekolah.
- d) Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan terus berupaya melakukan redistribusi tenaga pendidik, peningkatan fasilitas belajar, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera.

#### 4. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara secara rutin dimonitor dan dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, termasuk Bidang Pembinaan SMP, melalui pengawasan langsung ke sekolah, rapat evaluasi, serta sistem pelaporan digital. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap sekolah menjalankan program sesuai dengan pedoman dan mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil evaluasi menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan berikutnya, sehingga proses peningkatan kualitas pendidikan berjalan secara dinamis dan berkesinambungan.

#### 2. Harapan dan Rencana ke Depan

Kepala Bidang Pembinaan SMP berharap agar ke depan seluruh sekolah di Kabupaten Jepara dapat mencapai standar nasional pendidikan dengan peningkatan capaian akademik dan nonakademik yang seimbang. Dinas juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan pendidikan menengah sebagai fondasi pembentukan SDM unggul daerah. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan masyarakat, lembaga swasta, dan perguruan tinggi, dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara melalui Bidang Pembinaan SMP berfokus pada penguatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru. Pelaksanaan kebijakan berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan

sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik di wilayah terpencil. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar pendidikan di Kabupaten Jepara semakin maju, merata, dan berkualitas.

#### **4.2.3 Hasil Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Jepara, diperoleh gambaran bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengawasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan. DPRD menilai bahwa arah kebijakan dan visi misi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah sejalan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

Dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD 2025–2029), peningkatan kualitas pendidikan telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, dan penguatan karakter peserta didik. DPRD memandang bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

##### **1. Peran DPRD dalam Penyusunan dan Pengawasan Kebijakan Pendidikan**

Ketua DPRD menjelaskan bahwa DPRD berperan aktif sejak tahap perencanaan kebijakan, pembahasan RKPD, hingga pengesahan APBD. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD memastikan

bahwa kebijakan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Komisi C DPRD yang membidangi urusan pendidikan secara khusus mengawal agar alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dapat terpenuhi dan digunakan secara efektif. DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, seperti distribusi dana BOS, rehabilitasi sekolah, serta pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil. Pengawasan tidak hanya menyoroti aspek nominal, tetapi juga menilai dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

## 2. Koordinasi DPRD dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan

Koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme formal seperti rapat kerja, pembahasan KUA-PPAS, dan kunjungan lapangan, serta melalui jalur informal untuk mempercepat respons terhadap persoalan pendidikan di masyarakat. DPRD juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data misalnya angka partisipasi sekolah, kebutuhan ruang kelas baru, dan angka putus sekolah sebagai dasar penyusunan prioritas kebijakan pendidikan.

Pendekatan kolaboratif semacam ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Jepara, terutama di daerah pedesaan dan kepulauan seperti Karimunjawa yang masih menghadapi keterbatasan sarana, jaringan internet, dan tenaga pendidik.

### 3. Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendidikan

Dari sisi pendanaan, DPRD menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Jepara sudah cukup proporsional, yakni sekitar 24–26% dari total APBD dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah pemerataan distribusi anggaran antarwilayah. DPRD menekankan bahwa kebutuhan pendidikan di wilayah terpencil sering kali berbeda dengan daerah perkotaan, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang adaptif. Selain besaran anggaran, efektivitas dan ketepatan sasaran penggunaan dana juga menjadi perhatian DPRD. Untuk itu, lembaga ini terus memperkuat fungsi pengawasan agar setiap rupiah anggaran pendidikan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

### 4. Kendala dan Tantangan dalam Penguatan Kebijakan Pendidikan

Kendala utama yang dihadapi DPRD dalam memperjuangkan kebijakan pendidikan adalah terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan ketimpangan antarwilayah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jepara masih relatif kecil, sehingga ruang inovasi pembiayaan pendidikan menjadi terbatas. Selain itu, sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang dan kebutuhan aktual di lapangan masih perlu ditingkatkan. DPRD juga mencatat adanya hambatan birokrasi yang menyebabkan beberapa program pendidikan berjalan kurang optimal. Namun, lembaga ini terus berupaya memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan tetap berpihak kepada masyarakat bawah, terutama di sektor pendidikan dasar.

## 5. Pengawasan Efektivitas dan Akuntabilitas Program Pendidikan

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan, DPRD menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu:

- a) Pengawasan berbasis data, melalui laporan capaian kinerja Dinas Pendidikan.
- b) Kunjungan lapangan dan hearing dengan kepala sekolah serta komite sekolah untuk mengevaluasi implementasi kebijakan di lapangan.
- c) Pelibatan masyarakat, agar publik turut mengawasi penggunaan dana pendidikan.
- d) DPRD mendorong transparansi penggunaan dana melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pelaporan digital seperti ARKAS dan BOS Online. Pengawasan dilakukan tidak hanya pada tingkat kabupaten, tetapi juga hingga ke satuan pendidikan, guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik benar-benar diterapkan.

## 6. Peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru

Ketua DPRD menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan guru. Karena itu, DPRD mendorong peningkatan tunjangan bagi guru non-ASN serta mempercepat pembukaan formasi ASN guru di daerah. DPRD juga mendukung pelatihan dan peningkatan kompetensi guru melalui kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan lembaga pelatihan profesional. Dalam setiap pembahasan APBD, DPRD berupaya memastikan bahwa anggaran untuk peningkatan kapasitas pendidik tidak

dikurangi, mengingat peran guru sangat vital dalam menentukan mutu pendidikan di daerah.

#### 7. Sinergi dengan Masyarakat dan Stakeholder Pendidikan

Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dilakukan melalui berbagai forum partisipatif seperti Musrenbang, reses anggota DPRD, hearing publik, dan aspirasi digital. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat menyampaikan kebutuhan pendidikan secara langsung. Dengan sinergi tersebut, arah kebijakan pendidikan di Jepara menjadi lebih partisipatif dan responsif, tidak hanya top-down, tetapi juga bottom-up, sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### 8. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Pendidikan

Menurut Ketua DPRD, keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada komposisi berbagai faktor, yaitu:

- a) Anggaran yang memadai,
- b) Kualitas SDM (guru dan tenaga kependidikan),
- c) Ketersediaan sarana dan prasarana,
- d) Koordinasi antarinstansi yang solid, serta
- e) Pengawasan dan dukungan masyarakat.

Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadi kunci keberhasilan kebijakan pendidikan di Jepara, terutama di daerah rural dan kepulauan yang masih bergantung pada semangat gotong royong masyarakat. Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Jepara memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif,

transparan, dan berpihak pada masyarakat. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD berkomitmen mendukung visi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Meski masih terdapat kendala fiskal dan ketimpangan wilayah, DPRD terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan anggaran, pemerataan sarana, dan peningkatan kompetensi guru. Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Jepara dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

#### **4.2.4 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Batealit**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Batealit, diperoleh informasi bahwa visi dan misi pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Jepara telah memiliki arah yang baik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya diikuti oleh dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai. Sekolah di seluruh Kabupaten Jepara tidak menerima bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

##### **1. Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah**

Kepala sekolah menilai bahwa program pelatihan dan workshop peningkatan kompetensi guru dari Dinas Pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum berkelanjutan dan masih bersifat sporadis, sehingga efeknya belum signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi spesifik sekolah-sekolah di wilayah

pinggiran, yang memiliki keterbatasan sarana prasarana dan dukungan anggaran.

## 2. Keterlibatan Sekolah dalam Perumusan Kebijakan

Keterlibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas. SMP Negeri 1 Batealit selama ini hanya terlibat dalam forum sosialisasi atau musyawarah pendidikan, tanpa memiliki ruang partisipasi dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan anggaran secara langsung. Hal ini menyebabkan kebutuhan sekolah di lapangan sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

## 3. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Dalam pandangan Kepala Sekolah, implementasi kebijakan pendidikan dari pemerintah daerah belum berjalan efektif, terutama karena minimnya dukungan anggaran dan kurangnya penyesuaian terhadap kondisi lokal. Banyak kebijakan masih bersifat umum dan seragam bagi seluruh wilayah, tanpa mempertimbangkan kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan seperti di Kecamatan Batealit.

## 4. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan

Kendala utama yang dihadapi SMP Negeri 1 Batealit adalah tidak adanya dana BOSDA, yang menyebabkan keterbatasan dalam membiayai kebutuhan operasional sekolah. Selain itu, keterlambatan pencairan dana BOS pusat, kurangnya bantuan infrastruktur, serta keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran menjadi hambatan serius bagi sekolah dalam melaksanakan

program pendidikan secara optimal. Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas pembelajaran dan membatasi ruang inovasi dalam kegiatan belajar mengajar.

#### 5. Upaya Sekolah Mengatasi Ketimpangan Pendidikan

Untuk mengatasi ketimpangan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, SMP Negeri 1 Batealit melakukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi sederhana, memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan komite sekolah, serta mengoptimalkan sumber daya internal yang dimiliki. Guru didorong untuk lebih kreatif dan efisien dalam memanfaatkan bahan ajar serta media pembelajaran murah tetapi tetap efektif.

#### 6. Peran Masyarakat dan Komite Sekolah

Peran serta masyarakat dan komite sekolah di SMP Negeri 1 Batealit dinilai cukup aktif, meskipun terbatas pada dukungan nonfinansial seperti gotong royong, tenaga, dan partisipasi dalam kegiatan sekolah. Bentuk dukungan tersebut sangat membantu dalam memperbaiki fasilitas ringan dan menjaga keberlangsungan aktivitas pendidikan, meskipun tidak dapat menggantikan kebutuhan pendanaan yang bersifat struktural.

#### 7. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Guru

Dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru masih terbatas pada kegiatan pelatihan atau seminar. Belum terdapat insentif daerah atau tunjangan tambahan bagi guru karena tidak adanya BOSDA. Dengan demikian, guru masih bergantung pada gaji pokok dan tunjangan dari pemerintah pusat, tanpa dukungan tambahan dari APBD.

## 8. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan

Sekolah melakukan evaluasi internal secara rutin melalui rapat kepala sekolah dengan guru dan tim manajemen. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai efektivitas program pendidikan yang diterapkan serta menentukan langkah perbaikan di tingkat sekolah. Namun, hasil evaluasi ini tidak selalu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, karena belum ada mekanisme formal yang menjembatani hasil evaluasi sekolah dengan pembuatan kebijakan.

## 9. Harapan terhadap Pemerintah Daerah

Kepala sekolah berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan pemerataan alokasi anggaran pendidikan, khususnya melalui pemberian BOSDA bagi sekolah yang belum mendapatkan. Selain itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sekolah dan peningkatan kompetensi guru sangat diharapkan agar mutu pendidikan di daerah seperti Batealit dapat sejajar dengan sekolah di wilayah perkotaan. Sekolah juga berharap adanya komunikasi yang lebih intens dan partisipatif antara pihak sekolah dengan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Batealit menghadapi tantangan besar dalam implementasi kebijakan pendidikan daerah akibat keterbatasan anggaran dan kurangnya pemerataan fasilitas. Meskipun memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekolah masih membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik berupa bantuan operasional, pelatihan berkelanjutan, maupun pembangunan infrastruktur pendidikan. Keterlibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan

guru juga perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di semua wilayah, termasuk di daerah pedesaan.

#### **4.2.5 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Tahunan**

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 1 Tahunan menunjukkan bahwa secara umum visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memajukan sektor pendidikan dipandang positif dan selaras dengan kebutuhan pengembangan pendidikan di daerah. Pemerintah daerah dinilai memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan pendidikan, meskipun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.

##### **1. Pandangan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah**

Kepala sekolah menilai bahwa visi dan misi pemerintah daerah cukup relevan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Jepara. Arah kebijakan yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan peningkatan mutu pembelajaran dianggap mendukung kemajuan pendidikan, khususnya di tingkat menengah pertama. Namun, terdapat tantangan dalam hal realisasi di lapangan, terutama terkait pemerataan dukungan bagi seluruh sekolah.

##### **2. Program dan Kebijakan yang Berdampak terhadap Kualitas Pendidikan**

Beberapa program pemerintah daerah yang dinilai berdampak positif antara lain:

- a) Beasiswa bagi siswa berprestasi, yang memotivasi peserta didik untuk meningkatkan capaian akademik.

b) Kegiatan pengembangan kompetensi guru, baik melalui pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Kedua program tersebut berkontribusi terhadap peningkatan semangat belajar siswa dan profesionalisme tenaga pendidik, meskipun pelaksanaannya masih perlu diperluas dan diperkuat agar lebih merata.

### 3. Keterlibatan Sekolah dalam Perumusan Kebijakan

SMP Negeri 1 Tahunan terlibat secara tidak langsung dalam proses perumusan kebijakan pendidikan daerah. Keterlibatan tersebut dilakukan melalui forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta kegiatan koordinasi bersama Dinas Pendidikan. Sekolah juga mengikuti forum konsultasi atau sosialisasi kebijakan, namun belum memiliki peran aktif dalam penyusunan kebijakan inti atau perencanaan anggaran pendidikan daerah.

### 4. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Kepala sekolah menilai bahwa implementasi kebijakan pendidikan pemerintah daerah sudah cukup efektif, khususnya dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan peserta didik di wilayah perkotaan seperti Tahunan. Namun, efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan pada aspek pemerataan antar wilayah agar seluruh sekolah di Jepara memperoleh manfaat yang seimbang dari kebijakan yang diterapkan.

### 5. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, SMP Negeri 1 Tahunan menghadapi beberapa kendala utama, antara lain:

- a) Partisipasi orang tua siswa yang masih rendah dalam mendukung kegiatan belajar anak.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama fasilitas penunjang pembelajaran modern.
- c) Tingginya biaya pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pendidikan yang tidak seluruhnya dapat ditanggung oleh anggaran sekolah.

Kendala-kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pelaksanaan beberapa program sekolah serta menurunkan efektivitas kegiatan pembelajaran.

#### 6. Upaya Sekolah dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antara sekolah perkotaan dan pedesaan, sekolah melakukan berbagai langkah, antara lain:

- a) Menumbuhkan kesadaran belajar dan disiplin siswa, agar motivasi belajar tetap tinggi meskipun fasilitas terbatas.
- b) Mendorong kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran sederhana.
- c) Memperkuat karakter dan kedisiplinan siswa melalui kegiatan pembiasaan positif dan bimbingan rutin.

Langkah-langkah tersebut dinilai cukup efektif dalam menjaga mutu pendidikan di tengah keterbatasan yang ada.

#### 7. Peran Masyarakat dan Komite Sekolah

Kepala sekolah menyampaikan bahwa komite sekolah dan masyarakat memiliki peran yang cukup baik dalam mendukung kebijakan pendidikan di

sekolah. Bentuk dukungan yang diberikan antara lain partisipasi dalam kegiatan sekolah, pengawasan pelaksanaan program, serta bantuan sukarela untuk pemeliharaan fasilitas ringan. Walaupun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif berpartisipasi, dukungan sosial tersebut memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kegiatan pendidikan.

#### 8. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Guru

Pemerintah daerah dinilai sudah memberikan dukungan terhadap peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi Dinas Pendidikan. Namun, untuk aspek kesejahteraan guru, dukungan masih terbatas. Tunjangan tambahan atau insentif daerah belum berjalan optimal, sehingga kesejahteraan tenaga pendidik masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

#### 9. Evaluasi terhadap Kebijakan Pendidikan

Sekolah secara rutin melaksanakan evaluasi internal terhadap kebijakan pendidikan yang diterapkan, menggunakan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Evaluasi dilakukan dalam rapat manajemen sekolah bersama guru dan staf, untuk menilai efektivitas kebijakan serta menentukan langkah perbaikan di tingkat sekolah. Meskipun demikian, hasil evaluasi tersebut belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sistem evaluasi kebijakan daerah, karena komunikasi dua arah antara sekolah dan pemerintah daerah masih terbatas.

## 10. Harapan terhadap Pemerintah Daerah

Kepala SMP Negeri 1 Tahunan berharap agar pemerintah daerah:

- a) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan serta insentif daerah.
- c) Mendorong pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah, agar sekolah di pedesaan dapat mencapai standar mutu yang sama dengan sekolah perkotaan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 1 Tahunan menilai kebijakan pendidikan daerah cukup efektif, terutama di wilayah perkotaan yang mendapat akses dan dukungan memadai. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pemerataan kebijakan, penyediaan sarana, serta perhatian terhadap kesejahteraan guru. Keterlibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi perlu diperkuat agar kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara benar-benar dapat diterapkan secara komprehensif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

### 4.2.6 Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Batealit

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 3 Batealit menunjukkan bahwa visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memajukan pendidikan telah mengarah pada pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, namun implementasinya belum sepenuhnya menjangkau sekolah-sekolah di wilayah

pedesaan. Kondisi geografis, keterbatasan jumlah siswa, dan dukungan sumber daya menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas kebijakan di sekolah ini.

### 1. Pandangan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah

Kepala sekolah menilai bahwa visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jepara sudah baik dan sejalan dengan semangat pemerataan pendidikan, tetapi pelaksanaannya belum optimal di daerah pinggiran seperti Batealit. Sekolah-sekolah kecil di pedesaan belum mendapatkan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk fasilitas, anggaran, maupun pendampingan kebijakan.

### 2. Program atau Kebijakan yang Berdampak terhadap Kualitas Pendidikan

Beberapa program dari pemerintah daerah yang memberikan dampak positif terhadap sekolah antara lain:

- a) Pelatihan peningkatan kompetensi guru,
- b) Proses akreditasi sekolah, serta
- c) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan dari Dinas Pendidikan.

Namun demikian, Kepala SMP Negeri 3 Batealit menilai bahwa program-program tersebut belum diterapkan secara merata. Sekolah kecil di pedesaan sering kali tidak menjadi prioritas karena dianggap memiliki fasilitas yang sudah mencukupi akibat lokasinya yang berdekatan dengan sekolah dasar (SD) dalam satu kompleks.

### 3. Keterlibatan Sekolah dalam Perumusan Kebijakan

Keterlibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan pendidikan masih sangat terbatas. Sekolah hanya diundang untuk mengikuti sosialisasi setelah kebijakan ditetapkan tanpa dilibatkan dalam proses perencanaan. Tidak ada

mekanisme formal yang memungkinkan sekolah-sekolah kecil menyampaikan aspirasi atau kebutuhan spesifik mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan daerah.

#### 4. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan

Efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di SMP Negeri 3 Batealit dinilai masih rendah. Banyak kebijakan bersifat umum dan tidak mempertimbangkan kondisi khusus sekolah kecil di wilayah pedesaan. Misalnya, program pelatihan guru sering dilaksanakan di pusat kota, sehingga guru di sekolah pedesaan sulit berpartisipasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan akses transportasi. Akibatnya, peluang peningkatan kompetensi guru menjadi tidak merata.

#### 5. Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan

Kendala utama yang dihadapi sekolah antara lain:

- a) Jumlah siswa yang sedikit, sehingga alokasi dana BOS menjadi sangat terbatas;
- b) Minimnya sarana dan prasarana pendidikan;
- c) Tenaga pendidik yang harus merangkap banyak tugas administratif dan akademik; serta
- d) Keterbatasan jaringan internet, yang menghambat penerapan kebijakan berbasis digital.

Kondisi tersebut menyebabkan program-program pemerintah sulit diimplementasikan secara optimal di sekolah ini.

## 6. Upaya Sekolah dalam Mengatasi Ketimpangan Pendidikan

Dalam menghadapi ketimpangan antara sekolah pedesaan dan perkotaan, sekolah berupaya untuk:

- a) Memanfaatkan fasilitas bersama dengan SD yang berada satu kompleks,
- b) Menjalin kemitraan dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan minat masuk sekolah, dan
- c) Mengembangkan pembelajaran berbasis proyek sederhana agar siswa tetap termotivasi dan aktif belajar dengan sumber daya terbatas.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan inisiatif sekolah dalam mempertahankan kualitas pembelajaran meskipun dengan sarana terbatas.

## 7. Peran Masyarakat dan Komite Sekolah

Kepala sekolah menjelaskan bahwa peran masyarakat dan komite sekolah cukup aktif, khususnya dalam kegiatan gotong royong, perawatan fasilitas sekolah, serta dukungan moral terhadap kegiatan pendidikan. Namun, dukungan finansial dari masyarakat masih terbatas karena kondisi ekonomi warga pedesaan relatif lemah. Meskipun demikian, semangat partisipasi dan solidaritas sosial masyarakat menjadi kekuatan utama sekolah dalam mempertahankan keberlangsungan pendidikan.

## 8. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Guru

Pemerintah daerah telah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi kurikulum baru, tetapi belum terdapat insentif daerah atau tunjangan tambahan bagi guru di sekolah pedesaan. Guru masih bergantung pada gaji dan tunjangan dari pemerintah pusat, sementara kegiatan peningkatan kompetensi

banyak dilakukan secara mandiri oleh guru tanpa dukungan biaya yang memadai.

#### 9. Evaluasi terhadap Implementasi Kebijakan

Sekolah secara rutin melakukan evaluasi internal melalui rapat bulanan yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Evaluasi ini difokuskan pada menilai pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah dan menentukan langkah adaptasi agar sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Mekanisme ini penting untuk menjaga efektivitas program sekolah meskipun tanpa dukungan kebijakan yang spesifik dari pemerintah daerah.

#### 10. Harapan terhadap Pemerintah Daerah

Kepala SMP Negeri 3 Batealit berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah kecil di pedesaan, baik melalui penambahan bantuan BOS daerah (BOSDA) maupun pemerataan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, diharapkan pemerintah membuat program afirmatif yang mendukung peningkatan jumlah siswa dan mempertahankan keberadaan sekolah-sekolah di wilayah terpencil agar tidak tertinggal dalam kualitas maupun jumlah peserta didik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SMP Negeri 3 Batealit menghadapi berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah, terutama karena faktor geografis dan rendahnya daya dukung sumber daya. Meskipun kebijakan pemerintah daerah memiliki arah yang baik, implementasinya belum merata. Sekolah telah menunjukkan upaya adaptif melalui kerja sama masyarakat dan inovasi pembelajaran sederhana, tetapi dukungan konkret dari pemerintah

daerah masih sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara.

#### **4.2.7 Hasil FGD Tokoh Pendidikan Kabupaten Jepara**

*Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2025 menghadirkan sepuluh tokoh pendidikan Kabupaten Jepara yang aktif dalam dunia pendidikan formal maupun nonformal. Diskusi dipimpin oleh H. Hisyam Zamroni, S.Ag., M.Si., seorang tokoh pendidikan berpengalaman yang menjabat sebagai Kepala KUA, Wakil Ketua PCNU Jepara, dan mantan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara selama dua periode.

FGD ini bertujuan untuk menggali usulan dan rekomendasi strategis dari para tokoh pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara melalui sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

##### **1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Berstandar Nasional**

Para tokoh menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak akan optimal tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Jepara, terutama di daerah pedesaan. Peningkatan sarana prasarana juga harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar kesenjangan mutu antar sekolah dapat diminimalkan.

##### **2. Pembentukan Sekolah atau Madrasah Unggulan Berbasis Lokal**

Usulan kedua adalah pendirian sekolah atau madrasah unggulan yang berbasis lokal namun berstandar nasional dan internasional (Standar Garuda). Sekolah

ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan pendidikan di daerah, sekaligus mengangkat kearifan lokal Jepara ke tingkat nasional dan global.

### 3. Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM)

Para peserta FGD menilai bahwa minat baca masyarakat perlu ditumbuhkan sejak dini melalui perluasan akses terhadap sumber belajar di luar sekolah. Pendirian dan penguatan Taman Baca Masyarakat (TBM) di setiap kecamatan menjadi solusi konkret untuk mendukung literasi masyarakat, terutama di wilayah yang belum terjangkau fasilitas perpustakaan sekolah.

### 4. Pembentukan Balai Diklat Profesional

Usulan berikutnya adalah pembentukan Balai Diklat yang profesional dan mandiri sebagai pusat pelatihan bagi guru, tenaga kependidikan, dan pengelola lembaga pendidikan. Balai ini diharapkan dapat mengadakan program pelatihan berjenjang dan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan di Kabupaten Jepara.

### 5. Pembuatan Regulasi yang Mendorong Partisipasi Masyarakat

Tokoh pendidikan sepakat bahwa kebijakan pendidikan daerah harus melibatkan masyarakat secara aktif, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang inklusif dan partisipatif, agar masyarakat memiliki ruang untuk berperan langsung dalam pembangunan pendidikan.

### 6. Pelatihan dan Pengembangan Potensi Guru Secara Berjenjang

Guru merupakan faktor kunci peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan berjenjang dan berkelanjutan yang tidak

hanya fokus pada aspek pedagogik, tetapi juga pengembangan karakter, teknologi pembelajaran, serta kemampuan inovatif. Dengan demikian, guru dapat beradaptasi terhadap perkembangan kurikulum dan kebutuhan peserta didik di era digital.

#### 7. Pelibatan Guru dalam Pengambilan Kebijakan Pendidikan

Para tokoh juga mengusulkan agar guru lebih dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Guru memiliki pengalaman langsung dalam praktik pembelajaran di sekolah, sehingga pandangan mereka sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang realistik, aplikatif, dan tepat sasaran.

#### 8. Penambahan Anggaran Operasional Sekolah

FGD merekomendasikan agar pemerintah daerah memberikan tambahan dana operasional (BOSDA) kepada sekolah negeri maupun swasta. Tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan riil sekolah yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh dana BOS dari pusat, terutama untuk kegiatan non-akademik, pengembangan SDM, dan pemeliharaan fasilitas.

#### 9. Regulasi Kolaboratif antara Sekolah dan Wali Murid

Peserta FGD mengusulkan pembuatan regulasi yang aman dan jelas mengenai kolaborasi antara wali murid dan pihak sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Selama ini, bantuan dari wali murid sering terhambat karena kekhawatiran melanggar aturan penggunaan dana. Regulasi yang baik akan membuka ruang partisipasi masyarakat tanpa mengganggu transparansi dan akuntabilitas sekolah.

## 10. Peningkatan Kesejahteraan Guru

Usulan terakhir menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, terutama bagi tenaga pendidik di sekolah-sekolah swasta dan daerah terpencil. Para tokoh menilai bahwa motivasi dan dedikasi guru sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi mereka. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan insentif tambahan, tunjangan khusus, atau program penghargaan bagi guru berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan peningkatan kinerja.

Dari keseluruhan usulan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para tokoh pendidikan Jepara menilai peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan melalui strategi kolaboratif yang melibatkan tiga elemen utama: pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada kebijakan administratif, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, pemerataan fasilitas, serta peningkatan kesejahteraan guru dan partisipasi publik.

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Jepara, strategi utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan berakar pada visi pembangunan daerah “Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius.” Visi tersebut diterjemahkan dalam berbagai kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan kompetensi guru. Pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas strategis, tercermin melalui sejumlah program seperti Kartu Guru Sejahtera, Kartu

Sarjana Jepara, penguatan PKBM, serta fasilitasi anak tidak sekolah (ATS).

Kebijakan ini disusun melalui mekanisme perencanaan partisipatif, namun tetap mempertimbangkan arah kebijakan nasional.

Dinas Pendidikan kemudian merumuskan strategi operasional melalui peningkatan mutu pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang lebih merata. Fokus pada pengembangan guru ditempuh melalui program pelatihan dan pendampingan, baik secara daring maupun luring, meskipun pelaksanaannya dinilai belum merata. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menyusun pendekatan holistik yang meliputi aspek tenaga pendidik, fasilitas, dan akses layanan pendidikan.

Ketua DPRD Jepara menegaskan bahwa lembaganya mendukung kebijakan tersebut melalui alokasi anggaran yang cukup signifikan, yaitu sekitar 24–26% APBD. DPRD menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, strategi peningkatan kualitas pendidikan di Jepara secara formal telah memiliki dasar yang kuat, baik secara anggaran maupun program.

#### **4.3.2 Implementasi Kebijakan Pendidikan di Lapangan**

Meskipun strategi dan program telah dirumuskan dengan baik, implementasi kebijakan di lapangan tidak menunjukkan hasil yang merata. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, implementasi kebijakan pemerintah daerah lebih mudah dirasakan oleh sekolah yang berada di wilayah perkotaan, sebagaimana terlihat pada SMP Negeri 1 Tahunan. Sekolah tersebut memperoleh

manfaat yang cukup optimal dari pelatihan guru maupun bantuan fasilitas, sehingga mampu melaksanakan Kurikulum Merdeka dengan lebih adaptif.

Sebaliknya, sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan, seperti SMP Negeri 1 Batealit dan SMP Negeri 3 Batealit, menghadapi berbagai kendala dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Keterbatasan sarana prasarana, tidak adanya dana BOS daerah, keterlambatan pencairan BOS pusat, serta kurangnya pelatihan guru yang berkelanjutan membuat sekolah-sekolah tersebut belum merasakan dampak kebijakan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kualitas layanan di seluruh wilayah Jepara.

Selain itu, keterlibatan sekolah dalam proses perumusan kebijakan masih sangat terbatas. Sekolah-sekolah lebih banyak berperan sebagai pelaksana kebijakan (policy takers), bukan sebagai aktor yang ambil bagian dalam penyusunan kebijakan (policy makers). Hal ini menyebabkan banyak kebutuhan spesifik sekolah tidak terakomodasi dalam kebijakan daerah, karena informasi dari lapangan tidak terserap secara komprehensif ke dalam proses perencanaan.

#### **4.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Pendidikan**

Berdasarkan analisis data wawancara dan FGD, efektivitas kebijakan pendidikan di Jepara dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas fiskal daerah, kualitas sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan sarana prasarana. Kapasitas fiskal daerah yang terbatas menyebabkan pemerintah kesulitan memberikan BOSDA kepada seluruh sekolah, terutama sekolah negeri di wilayah pedesaan. Di sisi lain, kualitas guru dan tenaga

kependidikan menjadi faktor penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan, namun pelatihan yang tersedia belum mampu menjangkau semua guru secara merata.

Faktor eksternal mencakup kondisi geografis, partisipasi masyarakat, dan tingkat kesadaran orang tua terhadap pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedesaan menghadapi hambatan geografis dan akses teknologi yang terbatas, sehingga pelaksanaan program digitalisasi sekolah dan Kurikulum Merdeka berjalan lambat. Meskipun masyarakat di daerah pedesaan menunjukkan dukungan yang cukup baik melalui gotong royong, keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak dapat memberikan dukungan materiil yang signifikan.

Ketua DPRD dan tokoh pendidikan dalam FGD juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya evaluasi kebijakan pendidikan. Tanpa evaluasi berkala yang berbasis data, kebijakan sulit diarahkan secara adaptif untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan.

#### **4.3.4 Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Secara umum, kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan satuan pendidikan meliputi tiga dimensi utama. Pertama, dimensi struktural berupa keterbatasan anggaran, birokrasi anggaran yang lamban, dan tidak meratanya distribusi guru. Kedua, dimensi sarana prasarana, terutama kondisi sekolah pedesaan yang menghadapi keterbatasan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan koneksi internet. Ketiga, dimensi sosial-kultural, seperti rendahnya kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan anak serta minimnya kompetensi digital guru di beberapa sekolah.

Kendala-kendala tersebut saling berkelindan sehingga memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan. Tanpa penyelesaian yang bersifat sistemik, kebijakan yang secara konsep baik akan sulit menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jepara.

#### 4.3.4 Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Implementasinya di Sekolah

Evaluasi kebijakan pemerintah daerah menunjukkan bahwa berbagai program strategis untuk peningkatan mutu pendidikan telah dirumuskan, namun implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perkotaan, seperti SMP Negeri 1 Tahunan, cenderung memperoleh manfaat lebih besar dari program pelatihan guru, bantuan sarana prasarana, maupun supervisi dinas. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan akses, kesiapan sumber daya, serta frekuensi pendampingan yang lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.

**Tabel 4.1 Evaluasi Kebijakan**

No	Kebijakan Pemerintah Daerah	Bentuk Implementasi di Lapangan	Sekolah yang Menerima Manfaat	Sekolah yang Tidak Menerima / Minim Manfaat
1	Pelatihan & Workshop Guru (Kurikulum, MGMP)	Pelatihan berkala di kota, sebagian daring	SMPN perkotaan akses mudah, guru dapat ikut rutin	SMPN 1 Batealit, SMPN 2 Batealit & SMPN 3 Batealit (akses transportasi terbatas, tidak dapat ikut seluruh sesi)
2	Bantuan Sarana Prasarana (RKB, peralatan TIK)	Pembangunan ruang kelas baru & pengadaan perangkat	Lebih banyak dialokasikan ke sekolah perkotaan	Sekolah pinggiran laboratorium belum standar, fasilitas minim.
3	Program Penanganan ATS & PKBM	Pendampingan anak putus sekolah	Seluruh wilayah, namun lebih aktif di perkotaan	Daerah pedesaan capaian kurang maksimal

No	Kebijakan Pemerintah Daerah	Bentuk Implementasi di Lapangan	Sekolah yang Menerima Manfaat	Sekolah yang Tidak Menerima / Minim Manfaat
		kembali belajar		
4	Dana KOMITE	Tambahan operasional sekolah dari Wali peserta didik	Hampir seluruh sekolah di perkotaan wali murid punya kesadaran penuh untuk membantu sekolah	SMPN 1 Batealit, SMPN 2 Batealit & SMPN 3 Batealit kesulitan untuk menambahkan iuran wali murid untuk sekolah
5	Program Beasiswa Daerah (Kartu Sarjana Jepara)	Bantuan biaya kuliah bagi lulusan SMA	Siswa perkotaan lebih banyak akses	Sekolah pedesaan minim akses informasi
6	Supervisi dan Monitoring Dinas	Supervisi rutin ke sekolah	Lebih sering di sekolah perkotaan	Sekolah pedesaan monitoring tidak intensif
7	Dana BOSDA Kabupaten	Tambahan operasional sekolah dari APBD	Sekolah penerima manfaat tidak ada.	Sekolah penerima manfaat tidak ada.

Tabel ini memperjelas adanya ketimpangan implementasi kebijakan antara sekolah kota dan pedesaan, terutama terkait BOSDA, pelatihan guru, dan pengembangan sarpras.

**Tabel 4.2 Ringkasan Temuan dari Wawancara Utama**

No	Informan	Fokus Informasi	Temuan Utama
1	Bupati Jepara	Arah kebijakan pendidikan	Pemerataan akses, peningkatan mutu, dan kesejahteraan guru
2	DPRD Jepara	Pengawasan & Anggaran	APBD 24–26%, namun belum ada tambahan bantuan BOSDA
3	Dinas Pendidikan	Implementasi teknis	Pelatihan guru tidak merata, sarpras pedesaan tertinggal.
4	Kepala Sekolah	Realitas lapangan	Seluruh sekolah di Kabupaten Jepara Tidak menerima BOSDA

No	Informan	Fokus Informasi	Temuan Utama
5	Tokoh Pendidikan (FGD)	Rekomendasi daerah	Perlunya kelas afirmatif, Balai Diklat, sarpras berstandar SNP dan Perlunya SNP merata

#### 4.3 Pembahasan

##### 4.3.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Di SMP Kabupaten Jepara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memberikan pengaruh yang kuat terhadap strategi peningkatan kualitas pendidikan di SMP di Kabupaten Jepara. Strategi-strategi tersebut tercermin dari berbagai program seperti Kartu Guru Sejahtera, Kartu Sarjana Jepara, penguatan PKBM, fasilitasi ATS, hingga penguatan Kurikulum Merdeka, MGMP, dan sarana prasarana. Fakta ini sejalan dengan teori kebijakan.

Pemerintah daerah telah menyediakan dasar strategis melalui visi “Makmur, Unggul, Lestari, Religius” yang diterjemahkan ke kebijakan pendidikan. Hal ini mendukung temuan bahwa kebijakan publik tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi satuan pendidikan. Dukungan anggaran yang mencapai 24–26% APBD dari DPRD Jepara memperkuat bahwa struktur politik dan anggaran mendukung pelaksanaan strategi peningkatan mutu, sesuai teori implementasi (misalnya teori bahwa sumber daya adalah kunci keberhasilan implementasi).

Peningkatan strategi mutu melalui pendekatan pemerintah — seperti pengembangan guru, penyediaan sarpras, dan penguatan kurikulum — menunjukkan adanya upaya strategis yang komprehensif dan selaras dengan teori manajemen mutu pendidikan. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut sangat

ditentukan oleh bagaimana sekolah mampu menindaklanjutinya. Sekolah di wilayah perkotaan seperti SMPN 1 Tahunan mampu memanfaatkan kebijakan ini secara optimal, sementara sekolah perdesaan tidak mendapatkan manfaat yang sama.

Dukungan data empiris dari Rapor Pendidikan Kabupaten Jepara memperkuat analisis ini. Berdasarkan Rapor Pendidikan 2024, indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara berada pada kategori "Tuntas Madya" dengan nilai 82,73 naik dari nilai 69,08 pada 2023 ketika berada di kategori "Tuntas Muda". Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk usia 13–15 tahun (yang umumnya mencakup siswa SMP), pada 2024 tercatat 99,01%, meningkat dibanding 2023. Begitu pula untuk jenjang SMP umum capaian literasi 2024 berada di kategori baik dengan skor 77,77.

Dengan demikian, data rapor pendidikan menunjukkan bahwa pada tingkat kabupaten, kualitas layanan pendidikan dalam aspek partisipasi sekolah, literasi, numerasi, dan indikator lainnya memang telah menunjukkan tren peningkatan. Ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap mutu pendidikan. Namun demikian, catatan dari penelitian bahwa manfaat belum merata antar sekolah (perkotaan dan perdesaan) tetap relevan, meskipun rapor pendidikan kabupaten meningkat, hal ini tidak serta merta menjamin kesetaraan implementasi di semua tingkat sekolah. Kondisi lokal, kapasitas sekolah, dan sumber daya internal sekolah tetap menjadi faktor penentu efektivitas kebijakan.

#### **4.3.2 Kesenjangan (*Gap*) Antara Kondisi Aktual Dan Kondisi Ideal Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendidikan Di Jepara**

Temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara kondisi ideal yang direncanakan dalam kebijakan dan kondisi aktual pelaksanaannya di lapangan. Secara ideal, kebijakan pendidikan di Jepara dirancang untuk memberikan pemerataan mutu melalui program pelatihan guru, bantuan fasilitas, dukungan pendanaan, implementasi Kurikulum Merdeka, serta penguatan akses pendidikan bagi semua kelompok. Namun, implementasinya menunjukkan variasi yang cukup tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Sekolah-sekolah di wilayah pedesaan seperti SMPN 1 Batealit dan SMPN 3 Batealit mengalami kesulitan dalam mengakses pelatihan guru, tidak adanya BOSDA, serta terkendala pencairan BOS pusat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan struktural antara desain kebijakan dan kenyataan di sekolah. Hal tersebut mendukung pernyataan Mazmanian & Sabatier (1983) bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan kapasitas lokal.

Ketimpangan akses ini juga menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kualitas layanan. Idealnya, kebijakan pendidikan dirumuskan dengan mekanisme *bottom-up* yang menyerap kebutuhan sekolah. Namun temuan lapangan menunjukkan bahwa sekolah masih menjadi *policy takers*, bukan *policy makers*. Akibatnya, kebutuhan spesifik sekolah tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan membentuk celah antara perumusan kebijakan dan realitas implementasi.

Meskipun capaian kabupaten menunjukkan peningkatan—misalnya peningkatan indeks SPM dari kategori “Tuntas Muda” menjadi “Tuntas Madya”, kenaikan APS usia 13–15 tahun hingga mencapai lebih dari 99%, dan peningkatan skor literasi SMP secara kabupaten. Namun peningkatan tersebut belum merata di tingkat sekolah. Sekolah-sekolah di perkotaan dapat memanfaatkan program kebijakan dengan optimal, sedangkan sekolah di pedesaan masih tertinggal akibat keterbatasan akses, sarpras, dan dukungan operasional. Kesenjangan yang terjadi menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Jepara sudah tepat secara konseptual, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi nyata di seluruh wilayah. Implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kesenjangan sarana prasarana, kapasitas sumber daya manusia, dan akses terhadap program pemerintah. Hal ini menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata sekolah, terutama pada wilayah dengan keterbatasan sumber daya.

Dengan demikian, kesenjangan yang terjadi menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan di Jepara sudah baik secara konsep, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi nyata, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan sarpras, SDM, dan akses ke program pemerintah.

#### **4.3.3 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tidak Optimalnya Pelaksanaan Strategi Kebijakan Pendidikan Tersebut**

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak optimalnya implementasi strategi pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan. Faktor internal meliputi kapasitas fiskal daerah, kualitas SDM pendidikan, serta kondisi sarana prasarana. Kapasitas fiskal menjadi salah satu

faktor utama tidak adanya BOSDA, sehingga sekolah-sekolah di wilayah pedesaan tidak mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Edwards III bahwa keterbatasan sumber daya berdampak langsung pada efektivitas implementasi.

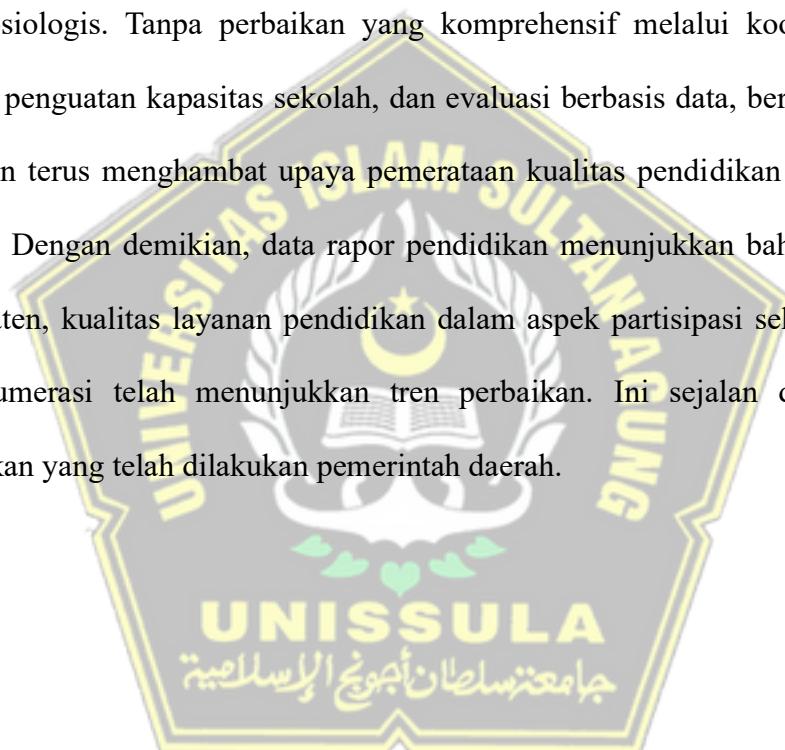
Selain itu, pelatihan guru yang tidak merata dan kurang berkelanjutan menyebabkan banyak guru belum siap melaksanakan Kurikulum Merdeka maupun inovasi pembelajaran. Tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi digital memadai juga menjadi hambatan penting pada era digitalisasi pendidikan.

Faktor eksternal seperti kondisi geografis, keterbatasan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat, dan tingkat kesadaran orang tua turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Sekolah pedesaan dengan akses teknologi yang minim secara otomatis tertinggal dalam pemanfaatan sistem pembelajaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa program-program digitalisasi belum didukung oleh kesiapan lingkungan.

Lemahnya koordinasi lintas sektor serta minimnya evaluasi berbasis data turut memperburuk efektivitas implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Jepara. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang kuat menyebabkan kebijakan tidak responsif terhadap kebutuhan aktual di lapangan, menunjukkan lemahnya *feedback loop* dalam siklus kebijakan publik. Temuan ini semakin relevan jika dikaitkan dengan data Rapor Pendidikan Kabupaten Jepara tahun 2022–2024 yang menunjukkan bahwa meskipun capaian di tingkat kabupaten mengalami peningkatan indeks SPM dari kategori “Tuntas Muda” menjadi “Tuntas Madya”,

peningkatan APS usia 13–15 tahun hingga lebih dari 99%, serta peningkatan nilai literasi dan numerasi jenjang SMP.

Sekolah-sekolah di wilayah pedesaan masih menghadapi hambatan akses terhadap pelatihan, BOSDA, dan sarpras, sehingga manfaat kebijakan tidak sepenuhnya terserap. Dengan demikian, faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sosiologis. Tanpa perbaikan yang komprehensif melalui koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas sekolah, dan evaluasi berbasis data, berbagai kendala ini akan terus menghambat upaya pemerataan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara. Dengan demikian, data rapor pendidikan menunjukkan bahwa di tingkat kabupaten, kualitas layanan pendidikan dalam aspek partisipasi sekolah, literasi, dan numerasi telah menunjukkan tren perbaikan. Ini sejalan dengan upaya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki peran sangat krusial dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan di Kabupaten Jepara, terlihat dari capaian Rapor Pendidikan yang menunjukkan tren positif seperti meningkatnya indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari “Tuntas Muda” menjadi “Tuntas Madya”, kenaikan capaian literasi-numerasi SMP, serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13–15 tahun yang mencapai lebih dari 99% pada 2024. Meskipun kebijakan telah dirumuskan sesuai visi pembangunan daerah dan kebutuhan peningkatan mutu, implementasinya belum berjalan merata antara sekolah perkotaan dan pedesaan. Kontribusi kebijakan terlihat signifikan melalui program peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, pemenuhan sarana prasarana, dan penguatan tata kelola sekolah, namun data Rapor Pendidikan juga menunjukkan variasi capaian antar satuan pendidikan yang menandakan belum tercapainya pemerataan mutu. Hambatan implementasi seperti ketimpangan distribusi guru, keberlanjutan pelatihan, kesiapan sekolah terhadap kurikulum baru, keterbatasan sarpras, serta kendala administratif, anggaran, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga turut mempengaruhi efektivitas kebijakan. Selain itu, strategi peningkatan mutu di sekolah sangat dipengaruhi kuatnya intervensi kebijakan yang diterima; sekolah yang memperoleh dukungan seperti BOS daerah, program peningkatan kompetensi guru, atau revitalisasi sarpras mampu menyusun strategi mutu yang lebih terarah,

sedangkan sekolah dengan dukungan terbatas menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peningkatan kualitas. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan di tingkat kabupaten belum sepenuhnya tercermin di tingkat sekolah, sehingga pemerataan dukungan, peningkatan koordinasi, dan pemanfaatan data Rapor Pendidikan secara lebih sistematis menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan SMP di Kabupaten Jepara secara lebih merata dan berkelanjutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan afirmatif yang secara khusus menasaskan sekolah-sekolah di wilayah pedesaan, dengan menyediakan BOSDA, pembangunan fasilitas prioritas, dan redistribusi guru. Kebijakan ini penting untuk mengurangi disparitas kualitas pendidikan antarwilayah.

### Bagi Pemerintah Daerah

1. Memperkuat perencanaan kebijakan pendidikan berbasis data, terutama pemetaan kebutuhan guru, fasilitas, dan capaian pendidikan setiap sekolah.
2. Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, tidak hanya pada aspek pedagogik namun juga literasi digital, kurikulum, dan manajemen kelas.
3. Mengoptimalkan alokasi anggaran pendidikan, terutama untuk pemerataan sarana prasarana sekolah yang masih tertinggal.

4. Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan agar implementasi di sekolah berjalan konsisten dan sesuai tujuan.

### **Bagi Guru**

1. Meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional secara mandiri, misalnya melalui pelatihan daring, komunitas belajar, dan kolaborasi antar-guru.
2. Berperan aktif dalam implementasi kebijakan, terutama kurikulum, inovasi pembelajaran, dan penilaian berbasis kompetensi.
3. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut peran aktif para pendidik. Guru diharapkan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalnya secara mandiri, baik melalui pelatihan daring, keterlibatan dalam komunitas belajar, maupun kolaborasi antar-guru untuk memperkaya praktik pembelajaran di kelas.
4. Guru juga perlu berperan aktif dalam implementasi kebijakan, terutama terkait kurikulum, inovasi pembelajaran, serta penilaian berbasis kompetensi, sehingga kebijakan pemerintah dapat benar-benar terwujud dalam praktik dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

### **Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Dapat memperluas penelitian pada tingkat pendidikan lain (SD atau SMA) atau memperdalam aspek tertentu seperti efektivitas kebijakan kurikulum, kompetensi guru, atau manajemen sekolah.
2. Melanjutkan penelitian dengan metode campuran (*mixed methods*) untuk mendapatkan temuan yang lebih komprehensif.

3. Menambah variabel penelitian lain yang berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan, seperti budaya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru, atau partisipasi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Referensi Teoritis:

1. Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th Edition). Los Angeles: SAGE Publications.
2. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
3. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
4. Sallis, E. (2014). *Total Quality Management in Education* (3rd Edition). New York: Routledge.
5. Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th Edition). Oxford: Oxford University Press.
6. Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th Edition). New York: Routledge.

Jurnal dan Artikel Penelitian:

1. Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. *American Economic Review*, 76(2), 323–329.
2. Rahardjo, S. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(3), 112-120.
3. Sari, D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–60.
4. Yuliana, T. (2021). Kendala Implementasi Kebijakan Pendidikan di Wilayah Pedesaan: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75–89.
5. Ostrom, E. (2010). Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. *American Economic Review*, 100(3), 641–672.

Dokumen dan Laporan Pemerintah:

1. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2022*. Jakarta: BPS.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara. (2022). *Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2022*. Jepara: Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Rencana Strategis Pendidikan 2021–2025*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Referensi Pendukung:

1. Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Dana BOS.

